

**ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
IN PUCANGSIMO VILLAGE AT BANDARKEDUNG MULYO
DISTRICT, JOMBANG REGENCY**

ABSTRACT

By :
Luluk Indrawati

Supervisor :
Lina Nasehatun Nafidah, SE, M.Aks

This study aims to determine the accountability of village financial management which includes: planning, implementation, administration, reporting, accountability of village financial financial management in Pucangsimo Village Bandarkedungmulyo District, Jombang Regency.

The research method used is descriptive qualitative by comparing the village financial management to the compliance with the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Data collection techniques through interviews and direct observation of the object of research. The determination of the observation area is carried out by considering the size of the Village Fund receipt.

The results of this study indicate that based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 113 of 2014 concerning Village Finance management in outline Village Finance management has achieved accountability. In addition, assistance is still needed from the local government in helping villages to realize the accountability of village financial management.

Keywords: Accountability, Village financial management

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA PUCANGSIMO KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG

ABSTRAKSI

Oleh :

Luluk Indrawati

Dosen Pembimbing :

Lina Nasehatun Nafidah, SE, M.Aks

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkomparatifkan pengelolaan keuangan desa kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya penerimaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan dari pemerintah daerah dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan keuangan Desa